



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAX DARMAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 93382

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **9.192.948.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 517.041.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 831.360.000
3. Bangunan Seluas 73.82 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.335.768.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/73 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 452.654.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 649 m2/414 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 5.925.045.000
6. Tanah Seluas 1123 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
7. Tanah Seluas 729 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
8. Tanah Seluas 1037 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
9. Tanah Seluas 3340 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
10. Tanah Seluas 2789 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
11. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, HASIL



SENDIRI Rp. 126.080.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

1.371.192.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

996.188.705

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

3.544.396.014

F. HARTA LAINNYA

Rp.

5.603.147.210

Sub Total

Rp.

20.957.871.929

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

20.957.871.929

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.